

PEMANFAATAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN AGROINDUSTRI

Oleh : Slamet Subandi

1. Urgensi Kelembagaan dalam Agroindustri

Karakteristik agroindustri yang menonjol adalah adanya ketergantungan antar elemen sistem, dalam sistem agroindustri. Austin (1992) menyatakan bahwa pemahaman mengenai keterkaitan antara elemen tersebut sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam merancang dan mengoperasikan agroindustri, yang terdiri atas tiga inti kegiatan yaitu pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran produk. Agroindustri harus dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas, atau terfokus pada empat keterkaitan sebagai berikut,

1) Keterkaitan mata rantai produksi.

Keterkaitan mata rantai produksi adalah keterkaitan antara tahapan-tahapan operasional mulai dari arus bahan baku pertanian sampai ke processing dan kemudian ke konsumen.

2) Keterkaitan kebijakan makro.

Keterkaitan kebijakan makro adalah keterkaitan berupa pengaruh kebijakan makro pemerintah terhadap kinerja agroindustri.

3) Keterkaitan kelembagaan.

Keterkaitan kelembagaan adalah hubungan antar-berbagai jenis organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dengan mata rantai produksi agroindustri.

-
- 1) *Disampaikan dalam seminar pemberdayaan Koperasi dan UKM Kalangan Peneliti dan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta instansi terkait, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008.*
 - 2) *Slamet Subandi. S.sos.MM adalah Peneliti pada Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya dan UKM dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM*

4) Keterkaitan internasional.

Keterkaitan internasional adalah saling ketergantungan antara pasar nasional dan pasar internasional yang didalamnya terdapat agroindustri berfungsi sebagai pengelolaan perusahaan agroindustri sebenarnya sama saja dengan pengelolaan perusahaan komersial lainnya. Untuk tiap kesempatan pasar, tiap pilihan harus mempertimbangkan sistem ekonomi dan hukum/legalitas, keadaan kelembagan dan prasarana, faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku individu atau kelompok masyarakat, dan kendala sumber daya seperti modal dan tenaga terampil,

Komponen-komponen pengelolaan perusahaan dapat dibagi menjadi dua jenis : (a) sistem-sistem yang akan ditempatkan dalam pengelolaan, dan (b) keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil dalam setiap sistem. Kualitas keputusan dan tindakan berikutnya merupakan fungsi atas kompetensi pengelola (manajer) dan karena itu maka sistem-sistem tersebut terdiri atas pilihan dan pengembangan pengelolaan serta kompensasi dan penghargaan. Menurut Aillo (1988), pengelolaan terdiri dari beberapa sistem sebagai berikut : (1) organisasi dan struktur, (2) informasi dan keputusan, (3) perencanaan, (4) pengukuran dan pengendalian, (5) pemilihan dan pengembangan pengelolaan, dan (6) penghargaan.

Perusahaan komersial atau industri melaksanakan sejumlah fungsi dasar yang terdiri atas : (1) kesatuan usaha (*corporate entity*), dan (2) fungsi usaha (*business function*). Sementara fungsi usaha terdiri dari : (a) pemasaran, (b) produksi, (c) pengadaan (*procurement*), (d) pendanaan, (e) tenaga kerja (*personnel*), dan (f) penelitian dan pengembangan.

Untuk tujuan di atas, peran yang diharapkan dari kelompok tani dan koperasi akan sangat tergantung pada keragaan kemampuan mereka pada saat ini. Untuk itu perlu kita lihat keragaan kemampuan dari kedua lembaga tersebut. Salah satu kriteria yang dapat kita gunakan adalah klasifikasi atau tahapan perkembangan lembaga-lembaga itu. Kelompok tani sebagian

terbesar memang berusia tidak muda lagi dan umumnya adalah kelompok tani tanaman pangan/padi yang sudah didirikan sejak era tahun delapan-puluhan. Pada saat ini, terdapat sekitar 204.000 kelompok tani tanaman pangan dengan kualitas yang lebih dari setengahnya sudah masuk dalam klasifikasi madya. Demikian juga lebih dari sepertiganya sudah berklasifikasi pemula dan lebih dari sepertiga berklasifikasi lanjutan. Dengan kata lain untuk kelas madya dan utama hanya kurang dari 8 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada umumnya kemampuan kelompok tani sendiri seharusnya sudah mampu mendukung.

Seberapa catatan kualitatif, baik berdasarkan studi maupun observasi, menemukan bahwa unsur penting dalam kelompok tani yaitu perencanaan. Kegiatan ini ternyata masih belum dikerjakan sendiri oleh kelompok tani, tetapi disodorkan atau dikerjakan oleh penyuluh pertanian lapang (PPL). Hal yang demikian merupakan gambaran bahwa sebuah kelompok tani yang handal, maju, dan dinamis sekarang ini belum banyak terlihat. Data lainnya mengungkapkan bahwa kelompok tani yang mencapai klasifikasi utama hanya 418 kelompok atau 0,20 persen saja. Tidak berbeda jauh dengan kelompok tani, kondisi koperasi yang dalam hal ini KUD juga belum bisa diandalkan, karena sebagian besar lembaga tersebut masih sangat bersandar pada program-program pemerintah. Dengan demikian perencanaan yang dibuatnya juga cenderung diorientasikan pada jenis program pemerintah yang akan dilaksanakan, serta tidak berdasarkan kepada kepentingan usaha para anggotanya.

2. Pembangunan Kelembagaan Agroindustri

Sasaran dan strategi pembangunan agroindustri tercermin dalam kebijakan nasional, yang mempengaruhi mata rantai produksi agroindustri. Kebijakan makro pembangunan ekonomi nasional dapat dikelompokkan ke dalam : (a) kebijakan fiskal (pajak dan subsidi), serta (b) kebijakan

moneter (kredit dan suku bunga), perdagangan (nilai tukar mata uang, pengendalian impor/ekspor) dan pendapatan (harga dan upah). Sebagai contoh subsidi harga pupuk mengurangi biaya input usaha tani, mendorong penggunaan pupuk lebih banyak, dan meningkatkan hasil, sehingga pasokan bahan baku untuk agroindustri lebih banyak dan mungkin dengan harga yang lebih rendah,

Kebijakan moneter berupa suku bunga misalnya akan mempengaruhi kemampuan penyimpanan produk yang dihasilkan (untuk menunggu harga yang lebih baik), sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Kebijakan perdagangan berupa nilai tukar yang "over valued" akan mengurangi biaya impor input usaha tani, tetapi output agroindustri mengalami persaingan yang berat dari barang serupa dari impor. Kebijakan pendapatan berupa, kebijaksanaan harga dasar hasil pertanian akan meningkatkan biaya bahan baku bagi industri yang menggunakan hasil pertanian, walaupun kebijaksanaan ini mungkin akan menguntungkan petani.

Dalam kaitannya dengan pengusaha limbah hasil hutan, diakui bahwa pada saat ini petani pengusaha limbah hasil hutan, jumlah dan profesionalisme masih sangat terbatas. Akibatnya kelembagaan yang meliputi institusi yang menangani organisasi dan aturan perundangannya pun masih belum terbentuk. Pada saat ini yang berlaku adalah penerbitan ijin industri kehutanan yang dikeluarkan oleh Departemen Industri dan Perdagangan, sedangkan penyediaan bahan baku ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun). Keadaan ini pada satu pihak sering mendatangkan ketidak-serasian di lapangan, misalnya, industri yang telah berdiri jarang dapat beroperasi secara maksimal karena bahan bakunya tidak cukup. Dipihak yang lain, industri yang berjalan juga ada yang disinyalir membeli bahan baku secara tidak legal.

Dari pengalaman tersebut di atas, agar industri dapat berkembang secara baik maka seyogyanya izin pendirian industri yang menggunakan bahan baku agroindustri diberikan oleh lembaga independen yang mempunyai komitmen kuat untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi. Hal ini pernah dianjurkan Saragih (1998), pada waktu menyampaikan pemikiran tentang pemberdayaan sektor agribisnis sebagai upaya penanggulangan krisis pangan dan devisa pada Diskusi Panel di Universitas Trisakti, Jakarta. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan sektor agribisnis dilakukan secara integratif. Dengan dasar pemikiran seperti itu maka setiap pengusaha yang akan membangun suatu industri wajib memikirkan pembangunan sumberdaya yang menghasilkan bahan baku tersebut misalnya hutan tanaman yang merupakan sumber bahan baku bagi industrinya.

Menurut Mutis (1999) untuk memberdayakan wirausaha dengan skala usaha kecil, menengah, dan koperasi ataupun kalangan usaha di sektor informal adalah salah satu bentuk menterjemahkan visi kerakyatan dalam fraxis bisnis kekinian. Selanjutnya dikemukakan perlunya dipikirkan bersama beberapa kondisi yang perlu ditangani yakni:

- a. Ungkapan visi kerakyatan merupakan ungkapan kepercayaan kepada rakyat termasuk meluasnya kesempatan kepada rakyat untuk berbisnis. Dengan demikian, kredit perbankan harus lebih banyak disalurkan ke usaha kecil, menengah, koperasi, dan sektor informal. Untuk memacu pasaran global perlu dirintis pola imbal beli yang tepat supaya produk dari wirausaha kecil, menengah, koperasi, dan sektor informal bisa disalurkan secara lebih banyak dalam pasar global.
- b. Peduli menggerakkan kemampuan rakyat sendiri guna lebih banyak menggali sumber daya dan sumber dana. Untuk itu pemerintah

diharapkan dapat menciptakan budaya untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi rakyat.

- c. Perlu dipacu suatu tatanan dan akses informasi seperti izin dan informasi lainnya sehingga mempermudah usaha rakyat untuk memicu biaya rendah agar terhindar dari pungutan yang tidak resmi yang menimbulkan biaya tinggi.
- d. Perlu dijalin suatu pola pemberdayaan melalui pelatihan, perdagangan, dan kemitraan sesuai konteks.
- e. Perlu dihidupkan suatu kewirausahaan kolektif untuk menampung produk rakyat dan mencari pasar untuk produk itu baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Elemen biaya transaksi yang berasal dari biaya birokrasi perlu dimurahkan dan pungutan terlalu banyak perlu dihilangkan agar orang tidak takut menjadi entrepreneur.
- f. Selain meningkatkan produk rakyat untuk pasar dalam negeri perlu dilakukan *road show* untuk produk-produk rakyat yang ditujukan pada masyarakat global.
- g. Perlu memperhatikan produk rakyat yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Untuk itu maka pemerintah perlu menggalakkan *research and development* untuk membantu meningkatkan mutu produk rakyat dalam lingkup *confirmance* (sesuai dengan standar konsumen).
- h. Ekonomi rakyat juga memacu tatanan manajemen yang berpijak pada keanekaragaman, serta pemanfaatan keanekaragaman tersebut secara integratif untuk mengembangkan potensi dari semua pihak secara optimal dengan berlandaskan kode terminasi.
- i. Ekonomi rakyat juga memacu tatanan perekonomian yang berdasarkan kepada pernekar ide - ide dalam lingkup pencerdasan pelaku ekonomi sehingga di dalam tatanan tersebut ide-ide merupakan mesin penggerak utama bagi pertumbuhan, efisiensi, penataan harga yang adil, perluasan kesempatan kerja, serta pemerdayaan suatu bangsa.

- j. Ekonomi rakyat juga memacu tatanan yang memberdayakan perekonomian yang didasarkan atas pengetahuan dan ketrampilan yang akan mempengaruhi cara individu atau bersama dalam berinteraksi satu dengan lainnya, dalam jaringan bisnis serta struktur bisnis yang adil serta transparan,

Sejalan dengan pemikiran Mutis di atas dapat dikemukakan bahwa sebelum mendirikan atau mengembangkan agroindustri di suatu daerah, pemilihan jenis agroindustri merupakan keputusan yang paling menentukan keberhasilan dan berkelanjutan agroindustri yang akan dibangun atau dikembangkan. Pilihan tersebut ditentukan oleh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada tiga komponen dasar agroindustri, yaitu penggandaan bahan baku serta, pengolahan dan pemasaran. Meskipun urutan ketiga kegiatan itu menggambarkan arus bahan dalam mata rantai agroindustri, namun pemasaran biasanya merupakan titik awal dalam analisis proyek agroindustri. Analisis pemasaran mengkaji lingkungan eksternal atau respon terhadap produk agroindustri yang akan ditetapkan, dengan melakukan karakteristik konsumen, pengaruh kebijaksanaan pemerintah, dan pasar internasional.

Kelangsungan agroindustri ditentukan pula oleh kemampuan dalam pengadaan bahan baku. Namun pengadaan bahan baku jangan sampai merupakan isu yang dominan sementara pemasaran dipandang sebagai isu kedua. Seperti dinyatakan oleh *Austin (1992)*, *Say's Law* tidak selalu berlaku; artinya pasokan tidak selalu menciptakan permintaan. Dalam hal ini, pemasaran maupun pengadaan bahan baku secara bersama menentukan keberhasilan agroindustri. Namun karena pengkajian agronomi memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup banyak maka identifikasi kebutuhan pasar sering dilakukan terlebih dahulu. Alasan lain adalah karena lahan dapat digunakan untuk berbagai tanaman atau ternak, sementara pengkajian

pemasaran dapat memilih berbagai alternatif tanaman atau ternak. Lebih lanjut Austin (1992) mengemukakan bahwa elemen utama analisis pemasaran terdiri atas : (a) analisis konsumen (kebutuhan konsumen, segmen pasar, penelitian pasar, (b) lingkungan persaingan (struktur pasar, dasar persaingan, dan pengaruh pemerintah, (c) rencana pemasaran (rancangan produk, penetapan harga, promosi, strategi distribusi), dan (d) prediksi permintaan (teknik prediksi penjualan).

3. Lembaga Koperasi

Ragam kelembagaan cukup banyak namun dalam bidang agroindustri yang berkembang di masyarakat petani adalah koperasi, kemitraan *contract farming* dan partisipasi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat sudah lama dikenal di Indonesia. Bahkan Dr. Muhammad Hatta salah seorang proklamator Indonesia yang dikenal sebagai Bapak koperasi mengatakan bahwa koperasi merupakan Badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra, 1993).

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan,

Perlu dikemukakan bahwa lembaga koperasi dalam konteks ini bukan semata-mata amanat Pasal 33 UUD 1945 (norma), melainkan yang lebih hakiki adalah bahwa koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan

dibandingkan lembaga ekonomi lainnya. Terutama pada agrobisnis /agroindustri dengan pembangunan ekonomi pedesaan, lembaga koperasi bukan satu-satunya pilihan dalam mengembangkan agroindustri di Indonesia, melainkan suatu kelebihan yang cukup penting dengan sangat besar artinya dalam mengembangkan kelembagaan koperasi, karena petani yang juga anggota koperasi selain sebagai anggota juga sebagai pemilik (owners) sekaligus sebagai pemakai (users).

Karena adanya berbagai penafsiran tentang koperasi sebagai akibat dari bentuk badan usaha ini yang mudah dimasuki oleh unsur-unsur non-ekonomi maka dalam membicarakan koperasi ada baiknya jika lebih dulu disepakati berbagai aspek penting dalam koperasi sebagai berikut:

A. Pengertian koperasi

a.1) Dalam rekomendasi ILO recommendation nomor 127 pasal 12 ayat (1) dirumuskan bahwa : *Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi.*

a.2) Menurut Internasional Cooperative Alliance (ICA)

Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis,

a.3) Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1) Koperasi adalah *Badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berkumpul secara sukarela (pasal 5 ayat (a.) untuk mencapai kesejahteraan (pasal 3), memodali bersama (pasal 4 ayat 1) dikontrol secara demokratis (pasal 5 ayat b), orang-orang itu disebut pemilik dan pengguna ajasa koperasi yang bersangkutan (pasal 17 ayat 1)*

a.4) Dari berbagai pengertian koperasi, Ibnu Soedjono (2000), mendefinisikan koperasi sebagai : *Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.*

B. Nilai- Nilai Koperai.

Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh badan usaha ekonomi lainnya. Dalam hal ini Ibnu Soedjono berpendapat bahwa : *“Koperasi-koperasi berdasarkan nilai - nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persaingan, keadilan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai ethis, dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain”.*

Prinsip menolong diri sendiri (self-help), percaya pada diri sendiri (self-reliance), dan kebersamaan (Cooperation) dalam lembaga koperasi akan dapat melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya, apabila para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai.

C. Prinsip-prinsip Koperasi

ICA (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi Sebagai berikut :

- Pertama* Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial politik dan agama.
- Kedua* Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan.
- Ketiga:* Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka .
- Keempat* Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.
- Kelima* Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi.

- Keenam* Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para nggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.
- Ketujuh* Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari kormunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggotanya.

D. Keanggotaan Koperasi

Berdasarkan pengertian koperasi yang dikernukakan oleh ICA di atas maka : *"Anggota Koperasi adalah orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis".*

Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, di pihak yang satu keberadaan anggota adalah sebagai pemilik berkewajiban memberikan kontribusi pada organisasinya. Di pihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Dengan kedua fungsi tersebut anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonorni.

Dilihat dari pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan, dan hak, serta kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka kedudukan anggota dapat diuraikan menjadi :

- a) Pemilik, pemakai, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi (melalui Rapat Anggota Tahunan).
- b) Orang-orang yang mempunyai kesepakatan berdasarkan kesadaran rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan

ekonomi dan sosial mereka, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunitas.

- c) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan spesifikasi koperasinya
- d) Keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orang yang :
 - d. 1) memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya.
 - d.2) memiliki keyakinan bahwa hanya dengan bergabung bersama-sama maka kepentingan ekonomi dan sosialnya secara bersama-sama akan dapat diselesaikan, dan
 - d.3) memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya.
- e) Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat kesadaran rasional dari orang-orang yang :
 - e.1) merasa cocok bila mereka melakukan kegiatan tolong-menolong khususnya dalam bidang ekonomi,
 - e.2) merasa kuat bila mereka bersatu menjadi anggota koperasi, dan
 - e.3) merasa tidak perlu bersaing dengan kegiatan usaha koperasinya.

E. Organisasi dan Koperasi

e.1). Organisasi

Organisasi sering diartikan sebagai interaksi dan kerja sama antara dua orang/pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sebuah perusahaan, kerja sama ini mutlak diperlukan karena kegiatan dalam perusahaan sangat kompleks, beraneka ragam, dan saling terkait antara yang satu dan yang lain. Kerja sama ini tidak terbatas antar karyawan di dalam perusahaan tetapi juga dengan berbagai pihak di luar perusahaan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

Organisasi koperasi dibentuk atas dasar kepentingan dan kesepakatan anggota pendirinya dan mempunyai tujuan utama untuk lebih mensejahterakan anggotanya. Sistem kontribusi insentif sangat relevan dalam suatu organisasi koperasi. Sistem tersebut dapat menjamin eksistensi koperasi dan sekaligus merangsang anggota untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Dalam pembicaraan mengenai organisasi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, kiranya lebih dulu perlu dipahami bahwa basis terendah dalam kehidupan pedesaan adalah "desa", atau kampung dusun-dusun kecil yang penduduknya hidup berkelompok dengan keterikatan/ketergantungan antar individu yang sangat erat. Komunitas penduduk berlangsung dalam rangka membangun kehidupan yang pada awalnya bersifat subsistem. Meskipun demikian (pola hidup subsistem), kaitan pemasaran sudah ada dengan daerah urban yang lebih modern. Dalam hal ini yang dikenal sebagai pedesaan adalah kumpulan rumah tangga petani yang secara tradisional mengambil keputusan-keputusan produksi, konsumsi, dan investasi. Di sektor perkotaan kegiatan yang sama dilakukan oleh lembaga perusahaan dan rumah tangga secara terpisah dengan tujuan memaksimalkan penghasilan perusahaan.

Dalam usaha petani untuk menaikkan pendapatan keluarga dan faktor konsumsi keluarganya (melalui peningkatan produksi usaha taninya) inilah, mereka banyak mengadakan kontak dengan dunia luar, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi. Penggunaan faktor produksi sedikit banyak ditentukan oleh ketentuan adat istiadat melalui lembaga tradisional seperti sistem Mapalus di Sulawesi dan sekarang melalui kelompok tani. Dengan berorganisasi ini koordinasi pemanfaatan sumberdaya yang langka bisa dinikmati oleh petani-petani individu. Dengan demikian apa yang tampak dalam kehidupan ekonomi para petani adalah hubungan kekerabatan itu sangat erat dan berpengaruh besar, sebab mereka hidup di

lokasi yang sama serta mendorong para petani bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan.

Hayami (1981) menguraikan bahwa faktor kegiatan kolektif/kerja sama kolektif (collective action) sangat penting untuk diorganisir terhadap pemanfaatan aset masyarakat. Petani secara individu sebagai unit produksi terkecil yang sulit untuk memperbesar keluarannya karena produksi agraris dihadapkan pada kendala proses biologi yang dipengaruhi oleh unsur ekologis, perlu bekerjasama. Penggunaan aset masyarakat (public goods) seperti pemanfaatan air sungai, secara fisik dan kelembagaan dalam kaitan kerja sama kolektif memungkinkan petani untuk membangun dan memelihara social *overhead* capital, yang tidak saja mengurangi ketergantungan pada faktor alam, tetapi menghindarkan mereka dari konflik-konflik sosial.

Hal lain yang patut dipertimbangkan mengenai kebutuhan kerja sama kolektif ditunjukkan oleh permintaan terhadap tenaga kerja. Pada musim panen permintaan tenaga kerja meningkat pesat dan di musim tertentu menurun drastis. Jadi, variasi musim, sangat menentukan sekali dan kegotong-royongan masyarakat menjadi faktor penting guna mengatasi ketidakpastian tingkat produksi. Sering kali semangat gotong-royong masyarakat diperlukan dalam kaitan pengalihan tenaga kerja, umpamanya penggantian tenaga kerja manusia dengan hewan dan mesin-mesin (seperti traktor) guna menaikkan produktivitas yang bila tidak dilandasi jiwa kebersamaan tadi, berbagai konflik kepentingan bisa muncul menjadi persoalan baru.

4. Membangun Agroindustri Melalui Pemberdayaan Koperasi

Di pedesaan umumnya ditemui klasifikasi penduduk menurut strata tertentu, misalnya atas faktor kepemilikan lahan. Dengan klasifikasi seperti ini

petani yang tidak memiliki tanah atau buruh tani berbeda kedudukannya dengan pemilik tanah (land lord). Dari aspek produksi, buruh tani juga berbeda kedudukannya dengan buruh industri karena buruh tani memiliki hak atas produksi yang dihasilkan (share cropping).

Pemilik tanah dan buruh tani masing-masing memberikan kontribusinya ke dalam proses produksi, kemudian pada waktu panen hasil yang diperoleh dibagikan sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang berlaku di daerah setempat. Jadi, dalam hal ini hubungan mereka tidak terbatas pada hubungan antara buruh dan majikan, tetapi lebih luas kedalam segi-segi sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh beberapa pengamat antropologi kaitan yang demikian disebut sebagai *A Patron-Client Relationship*. Pola hubungan ini mencakup patron sosial dan ekonomi dalam arti luas. Hayami (1981), dari hasil penelitiannya di desa negara-negara Asia mengemukakan bahwa pembicaraan masalah pedesaan tidaklah lengkap tanpa menyingung proses interaksi sosial masyarakat. Interaksi sosial didefinisikan sebagai fungsi utilitas seseorang yang mencakup reaksi orang lain terhadap aksi orang yang pertama.

Dari eratnya tali kekerabatan tersebut lebih memudahkan terbentuknya "lembaga organisasi pedesaan". Dalam hal ini ketatnya struktur sosial masyarakat menghindarkan masyarakat keluar dari sistem karena terikat pada norma-norma sosial yang berlaku dalam tradisi tiap-tiap suku bangsa. Di Indonesia pada tingkat paling sederhana di kenal lembaga arisan yang bergerak dalam konteks mempertahankan ekonomi keluarga melalui tabungan bersama dan sekaligus menjadi forum kontak sosial bagi masyarakat/anggotanya. Biasanya kelompok arisan beranggotakan masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah yang sama atau berdasarkan kriteria-kriteria homogen lainnya. Dapat juga arisan bersifat

tertutup dengan hanya beranggotakan keluarga ataupun asal daerah tertentu.

Sifat arisan agak individualistis yang dalam hal ini kepentingan perorangan diwujudkan atas dasar pertolongan orang lain secara bersama-sama. Dalam perkembangannya arisan menjurus pada kumpulan sosial sebab sumbangan (share) per anggota tidak dapat diharapkan menolong belanja rumah tangga, terlebih lagi arisan jarang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan produktif, umumnya arisan bersifat konsumtif. Kelompok-kelompok arisan dewasa ini lebih banyak dikenal di perkotaan yang merupakan manifestasi untuk mempertahankan sifat umum atau pembawaan dasar masyarakat Indonesia berupa tolong-menolong atau gotong-royong. Corak kolektif masyarakat desa yang tetap bertahan tersebut di sementara kalangan pengamat ekonomi Indonesia dimasukkan ke dalam katagori koperasi sosial.

Koperasi sosial sebagai cikal bakal koperasi belum dikelola secara profesional, yang dalam hal ini tidak ada perhitungan ekonomi yang rumit dan dikelola secara insidental yang semata-mata menjadi ajang pertemuan sosial. Sifat non permanen itu biasanya menurun di saat anggota mendirikan sarana umum, seperti mendirikan rumah, menyantuni piatu, mendirikan mesjid, mengurus perkawinan, dan kematian. Setelah kegiatan tersebut rampung kelompok ini dengan sendirinya akan membubarkan diri dan bila diperlukan bisa dibentuk kembali. Prinsip tradisionalisme untuk bersama-sama menanggung dan mengatasi persoalan merupakan ciri khas sifat sosialisme Indonesia dengan tetap mempertahankan hak-hak asasi manusia sebagai pribadi dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang aspek ekonomi kecenderungan mengorganisir kegiatan dengan pola kerja sama saling tolong menolong atau gotong-royong adalah rasional dalam upaya memanfaatkan sumber-sumber produksi yang tersedia cukup tetapi

menyebarkan. Penghimpunan sumber-sumber tersebut ke dalam suatu kegiatan tertentu secara tidak langsung akan menurunkan biaya sosial (*social overhead cost*), di samping juga akan dapat mengatasi masalah kekurangan faktor-faktor produksi lainnya, seperti modal yang relatif langka. Jadi, kelangkaan sumber daya dan penghematan biaya adalah latar belakang utama bagi masyarakat desa untuk berkelompok menjadi satu kesatuan kekuatan sosial ekonomi dalam memenuhi kepentingan bersama.

Keadaan seperti di atas dapat diamati pada perkembangan organisasi Mapalus di Sulawesi Utara, Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat, dan Subak di Bali, serta berbagai bentuk kelompok semacam ini pilih di daerah lainnya. Pendekatan pembangunan yang banyak bersifat pelaksanaan rencana dari atas (pemerintah) yang dikenal dengan pola *top down* approach ada kalanya juga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan lembaga-lembaga atau organisasi ekonomi pedesaan. Dengan pola dari atas ini organisasi organisasi pedesaan lebih sering tidak dapat mengembangkan dirinya dengan baik terlebih lagi bila rencana pemerintah itu sudah berupa suatu paket yang didalamnya juga termasuk sistem lembaga pelaksana.

Penduduk daerah pedesaan dengan organisasi ekonomi yang konvensional yang ada dalam banyak hal tentunya lebih mengetahui apa yang mereka perlukan untuk pembangunan dan bagaimana cara menghimpun sumber daya pedesaan yang tersebar menjadi satu kekuatan yang utuh. Untuk menghindari dampak tersebut aspirasi masyarakat desa yang dapat disalurkan melalui organisasi-organisasi yang telah ada, merupakan masukan sangat berharga untuk dikaji dan dirumuskan. Sedangkan sistem organisasi ekonomi yang memang telah tumbuh sejak lama dapat diarahkan dan dibina untuk dapat bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan perekonomian. Di samping itu, organisasi ekonomi atau sosial, yang merupakan bentuk kerja sama antar

masyarakat desa tersebut dapat disempurnakan dan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai rencana pembangunan dari atas.

Berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang ada di pedesaan umumnya dimiliki ciri yang pluratistik. Dengan pengertian luas, yang dikatakan oleh Gunardi (1981) sebagai kolektivisme desa maupun kolektivisme asli. Ciri utama kolektivesme tersebut adalah semangat gotong-royong, tolong menolong, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi yang tinggi dalam pola paguyuban yang kuat.

Berbagai bentuk organisasi sosial dan ekonomi yang ada dan berkembang di pedesaan seperti Subak, Mapalus, Lumbung Pitih Nagari pada dasarnya merupakan wujud dari *koperasi* sosial. Bila lembaga semacam ini dibina maka akan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun *koperasi modern* yang mandiri, berdaya guna, dan berhasil guna bagi pembangunan ekonomi masyarakat desa dan pedesaan.

5. Penutup

Pembahasan pada bab-bab di muka lebih banyak berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan yang jumlahnya cukup besar sehingga memudahkan pertukaran tenaga kerja dalam suatu kegiatan atau keterkaitan sosial antara anggota masyarakat desa. Prinsip moral tradisional dan interaksi sosial di pedesaan cenderung diangkat ke permukaan untuk menjamin tidak menurunnya tingkat hidup subsistem seluruh anggota masyarakat terhadap ancaman berkurangnya penghasilan petani sebagai dampak dari perubahan iklim atau penyakit tanaman.

Hayami dan Kikuchi (1981) menyebut bahwa kedua hal itu sebagai moral ekonomi, meskipun moral ekonomi ini tidak mampu bertahan terus secara utuh dari pengaruh eksternal. Ikatan-ikatan sosial lambat laun

merenggang deringan adanya penetrasi ekonomi pasar dari sistem ekonomi kapitalis. Perubahan baru mulai berlangsung, yang dalam hal ini pertimbangannya adalah untuk memperoleh keuntungan maksimum mendasarkan kegiatan ekonomi para petani.

Di beberapa negara Asia perubahan tersebut dirasakan dengan menurunnya unsur tolong-menolong dan merenggangnya hubungan kekerabatan. Petani kecil terpaksa menjual lahan miliknya yang tidak seberap luas sedangkan untuk mempertahankan hidup mereka menawarkan jasa tenaga kerja. Sebagian lainnya menjadikan tanah dengan orientasi pasar yang oleh Marx dan Lenin dipandang sebagai proses polarisasi sektor pertanian akibat sistem kapitalis. Dampak negatif ekonomi kapitalis merambat ke dalam kubu masyarakat pedesaan. Moral ekonomi tidak lagi dapat berfungsi untuk melindungi kaum miskin sebab setiap anggota masyarakat berusaha memperoleh penghasilan masing-masing.

Popkin dan Hayarni (1981) menekankan bahwa dalam masyarakat ekonomi tradisionalpun, sebenarnya motivasi untuk kepentingan individu sudah ada bahkan dapat melebihi motivasi untuk kepentingan kelompok. Mancur Olsan (1965) mengistilahkannya sebagai *the free rider problems* di mana *Everyone tries to claim profit from the group without sharing the cost.*

Implikasi yang merugikan kehidupan masyarakat dari sistem ekonomi pasar di pedesaan Indonesia memang belum separah penemuan Hayarni di beberapa negara Asia lainnya. Namun, tendensi ke arah itu sudah mulai menggejala, terbukti dengan semakin menyempitnya rata-rata luas pernilikan lahan dan mengalirnya sebagian besar penduduk desa ke daerah urban untuk mendapatkan lapangan kerja baru, karena sudah semakin berkurang lapangan kerja di desa.

Menyadari kekurangan yang demikian, dan kenyataan serta tantangan hidup yang semakin berat, maka masyarakat desa dituntut untuk mengaktifkan fungsi kelompok (baik karena kesadaran sendiri atau pun karena pengaruh pemerintah) untuk menyelesaikan persoalan ekonomi mereka. Jenis organisasi yang muncul beraneka ragam mulai dari kelompok yang didasarkan pada aspek kesehatan seperti Keluarga Berencana (KB), yang berdasarkan kegiatan keluarga seperti PKK, kelompok pengajian (kegiatan agama), kelompok arisan, dan kelompok tani, yang semuanya secara tersamar berupaya memperbaiki kedudukan ekonomi anggotanya. Di antara berbagai bentuk organisasi masyarakat tersebut hanya koperasi yang secara tegas menamakan dirinya sebagai organisasi ekonomi tanpa melepas karakter pedesaan yaitu watak sosial.

Gerakan-gerakan itu tidak terlepas dari pengaruh peranan pemimpin-pemimpin informal di pedesaan (guru, pemuka masyarakat, ulama, dan lain-lain). Masyarakat pedesaan sejak dulu terikat pada kultur patrimonial yang dalam hal ini setiap tindakan tokoh panutan akan cepat diterima.

Dari banyak bukti empiris terlihat bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, sistem organisasi yang memungkinkan berkembangnya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan karena adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang berkaitan dengan insentif. Hal ini merupakan kata kunci yang akan membimbing ke arah peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, (2006), Kumpulan hasil-hasil Workshop Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UMKM (laporan sementara belum diterbitkan)
- Surya Dharma Ali, (2007), Komitmen Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Disampaikan pada Seminar Prospek Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Usaha Pengembangan Masyarakat Jakarta.
- Nasution Muslimin, (2001), Koperasi, Konsepsi Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa Depan Bangsa.
- , (1996), Membangun Koperasi Sebagai Wahana Efektif Untuk Memberdayakan Perekonomian Rakyat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Ibnu Soejono, Et.al, (1996), Koperasi Di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi FORMASI, Jabatan

**PEMANFAATAN KOPERASI DALAM
PEMBANGUNAN AGROINDUSTRI**

Oleh : Slamet Subandi

**ASISTEN DEPUTI URUSAN PENELITIAN KOPERASI
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2007**